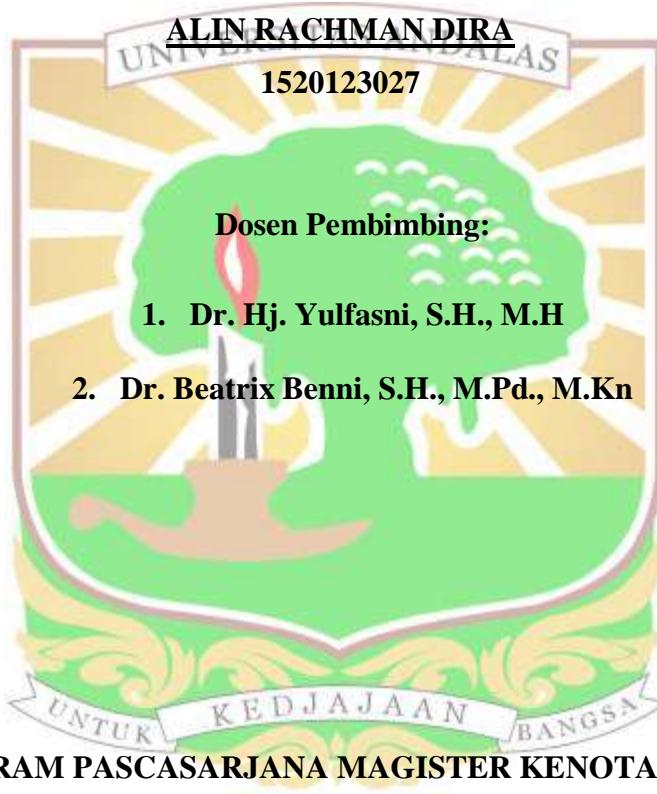


TESIS

**ANALISA YURIDIS TERHADAP KEWAJIBAN NOTARIS DALAM MELEKATKAN
LEMBARAN SIDIK JARI PENGHADAP PADA MINUTA AKTA BERDASARKAN**

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014

OLEH :



PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

2018

ANALISA YURIDIS TERHADAP KEWAJIBAN NOTARIS DALAM MELEKATKAN LEMBARAN SIDIK JARI PENGHADAP PADA MINUTA AKTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014

(Alin Rachman Dira, 1520123027, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2018)

Abstrak

Pada tanggal 15 Januari 2014 dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris terdapat perubahan yang mengatur kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan seorang Notaris, salah satunya dengan penambahan kewajiban Notaris yang berisi kewajiban untuk melekatkan sidik jari penghadap kedalam minuta akta. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJNP yang menyatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya Notaris wajib melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta. Namun Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan (UUJNP) tidak mengatur lebih lanjut mengenai bagaimana prosedur dari pelekatan sidik jari itu dan bagaimana penerapannya kedalam sebuah akta sehingga mengandung kekosongan hukum dan menimbulkan multitafsir. Masalah yang diteliti dalam penulisan ini yaitu bagaimana analisa mengenai ketentuan pelekatan sidik jari pada minuta akta berdasarkan pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan bagaimana sanksi terhadap Notaris yang tidak menjalankan kewajiban pelekatan sidik jari pada minuta akta berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif bersifat analitis dimana datanya bersumber dari bahan-bahan kepustakaan dan penelitian lapangan yang dianalisis secara kualitatif. Dari penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kewajiban Notaris dalam melekatkan sidik jari penghadap pada minuta akta tidak memiliki pengaturan yang jelas atau terdapat norma kosong didalam UUJNP, akan tetapi kewajiban Notaris dalam melekatkan lembaran sidik jari tersebut adalah untuk menjamin pembuktian atas kehadiran penghadap dan memberikan perlindungan hukum kepada para pihak termasuk Notaris itu sendiri. Didalam penerapannya Notaris dapat menerapkannya menggunakan jempol kanan dan melekatkannya pada lembaran tersendiri sesuai dengan kesepakatan yang telah diambil oleh Ikatan Notaris Indonesia, namun tidak menutup kemungkinan bahwa Notaris dapat menerapkannya berdasarkan caranya sendiri asalkan tidak bertentangan dengan UUJNP. UUJNP juga mengatur mengenai sanksi apabila Notaris melakukan pelanggaran, diantaranya adalah sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian dengan tidak hormat. Serta sanksi perdata berupa akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan hingga dapat dituntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris. Notaris yang tidak menjalankan kewajiban pelekatan sidik jari penghadap pada minuta akta dapat dikenai sanksi berupa sanksi administratif yang dapat diberikan secara berjenjang. Saran, agar Notaris dapat mentaati UUJNP dan Kode Etik Notaris, agar masyarakat dapat mematuhi setiap prosedur yang diberikan Notaris dalam membuat akta, termasuk pengambilan sidik jari, dan agar pemerintah dapat memperbarui Undang-Undang Jabatan Notaris khususnya mengenai pelekatan sidik jari penghadap pada minuta akta Notaris.

*Kata Kunci: Kewajiban Notaris, Sidik Jari, Minuta Akta

YURIDICAL ANALYSIS OF THE NOTARY'S OBLIGATION TO ATTACH FINGERPRINT SHEETS TO MINUTA DEED BASED ON LAW NUMBER 2 OF 2014

(Alin Rachman Dira, 1520123027, Program Master of Notary Faculty of Law Andalas University, 2018)

Abstract

With the implementation of Law number 30 of 2014 on January 15th, 2014 as the replacement of Law number 2 of 2014 regarding the Notary Position there were changes that governed the obligations that must be filled out by a Notary, one of them is by increasing the obligation of the Notary it is also contained the obligation to attach fingerprints into minuta deed. This is as stated in Article 16 paragraph (1) letter c of UUJNP which states that in carrying out his position a Notary is obliged to attach letters and documents as well as fingerprints against the deed. But the Notary Amendment Act (UUJNP) does not regulate further how the procedure of attaching fingerprints and how to apply them to a deed so that they contain no regulation and lead to multiple interpretations. The problem examined in this paper is how the analysis of the provisions of fingerprint adhesion on minuta deed based on article 16 paragraph (1) letter c of Law Number 2 of 2014 and how the sanction against Notary who does not carry out the obligation of fingerprint attachment to the deed based on the Act Law Number 2 Year 2014. In this research, the method used is normative analytical juridical method in which the data comes from library materials and field research that is analyzed qualitatively. From this research it can be concluded that the obligation of a Notary in attaching fingerprints to minuta deed does not have a clear regulation or that there is no regulation in UUJNP, however the obligation of the Notary in attaching the fingerprint sheet is to guarantee proof of the presence of the attendant and provide legal protection to the parties including the Notary itself. In its application the Notary can apply it using the right thumb and attach it to a separate sheet in accordance with the agreement that has been taken by the Indonesian Notary Association, but does not rule out the possibility that the Notary can implement it based on his own way provided it does not conflict with UUJNP. UUJNP also regulates sanctions if a Notary commits a violation, including administrative sanctions in the form of written warnings, temporary terminations, respectful terminations, and dishonorable dismissals. As well as civil sanctions in the form of a deed only have the power of proof as an under-hand deed, it can be prosecuted for reimbursement of costs, compensation and interest to the Notary. A notary who does not carry out the obligation of attaching fingerprints to minuta deed can be subject to sanctions in the form of administrative sanctions that can be given in stages. Recommendation, Notary would be able to comply with the regulation of UUJNP and Notary's code of conduct, public would be able to obeys every procedure of Notary in making a deed including fingerprinting and the government would be able to renew Notary's law concerning to attaching minaret's fingerprints of notary deed.

* Keywords: Obligation of Notary, Fingerprint, Minuta Deed